

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dan bisnis secara global pada tahun 1990-an menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Mobilitas tingkat produksi, modal dan sumberdaya manusia terus meningkat karena pelaku bisnis menyadari bahwa pentingnya pasar global dibanding hanya melayani pasar dalam negeri (Mudrajad Kuncoro, 2001:37). Pada tahun 1992 Indonesia tergabung pada AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), kawasan ASEAN ini terbentuk sebagai suatu tempat produksi yang berdaya saing tinggi, tujuan yang akan dicapai adalah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan perdagangan bebas yaitu perdagangan dalam kawasan tidak mengalami hambatan apa pun.

Ketika proses ini berjalan, di dalam perekonomian Indonesia justru terjadi hal yang sebaliknya yaitu meningkatnya hambatan perdagangan antar daerah, dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain atau dari daerah kota/ kabupaten yang satu ke daerah kota/ kabupaten yang lain. Hal ini juga terjadi pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama tahun 1996 hingga tahun 2001 telah mengeluarkan 6 perda (Peraturan Daerah) yang intinya mengenakan pungutan (retribusi) atas barang yang diperdagangkan ke luar provinsi dan berbagai pungutan di sektor perhubungan yang juga berpengaruh terhadap perdagangan. Kegiatan ini kemudian dapat

mengancam perdagangan antar provinsi dan pada gilirannya menjadi ancaman bagi pertumbuhan daerah.

Dengan pemerintahan terpusat maka pemerintah daerah hanya menunggu kebijakan dari pemerintah kota, namun pemerintah kota dan daerah mulai menyadari bahwa hanya menunggu kebijakan dari pemerintah kota untuk menyelesaikan masalah di daerah tidaklah efektif karena pemerintah kota tidak mengetahui kemampuan dan kelebihan setiap daerah yang akan dikembangkan. Faktor pelayanan sosial masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi dasar alasan mengapa otonomi daerah diperlukan.

Alasan lain yang menyebabkan terciptanya tuntutan otonomi daerah adalah, pertama, penolakan terhadap pembangunan yang bersifat sentralistik dimana yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap daerah. Kedua, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dan telah menimbulkan masalah pada kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Ketiga, otonomi adalah jawaban bagi pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki.

Pada akhirnya MPR menjawab tuntutan tersebut dengan salah satu ketetapannya, Ketetapan MPR yang dimaksud adalah Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada tanggal 15 Oktober 2004, disahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi atas Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Pada 15 Oktober 2004, disahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai revisi atas Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Maka yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang adalah pemerintah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat dimaksimalkan maka daerah tersebut juga akan semakin maju dari sisi perekonomiannya.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi lima wilayah yaitu satu kota dan empat kabupaten. Provinsi ini juga melakukan hal yang sama, yaitu berupaya memaksimalkan dan mengembangkan potensi dari setiap daerah yang dimilikinya ketika undang-undang otonomi daerah dilaksanakan. Namun otonomi daerah ini tidak selalu berjalan seperti apa yang diharapkan, daerah yang belum siap terhadap otonomi akan mengalami kesulitan keuangan karena mereka masih perlu menerima bantuan dari pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan

potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah tersebut miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang selama ini menguasai sumber-sumber keuangan yang potensial tersebut.

Sebelum otonomi daerah dilaksanakan pada tahun 2001, daerah pusat (*core*) jauh lebih berkembang dari pada daerah pinggiran (*hinterland*), dimana pemerintah pusat lebih mementingkan peran investasi dan pengembangan ke pusat daripada daerah pinggiran. Daerah pusat yang dimaksud disini adalah kota, yang umumnya menawarkan berbagai kelebihan dalam bentuk produktifitas dan pendapatan yang lebih tinggi, menarik investasi baru, teknologi baru, pekerja terdidik dan terampil dalam jumlah yang jauh lebih tinggi di banding daerah pinggiran (Malecki, 1991). Hal ini menyebabkan tenaga kerja dari daerah pinggir lebih tertarik berkerja di daerah kota dan meninggalkan daerahnya. Akibatnya tidak sedikit masalah ekonomi maupun masalah sosial yang terjadi, bermigrasinya tenaga kerja dari daerah pinggir menuju daerah pusat dan ketidakmerataan sumberdaya ini tercermin pada konsentrasi kegiatan ekonomi yang terjadi pada pusat saja. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah pinggiran,

Ada dua teori yang dapat menjelaskan fenomena ini. Pertama, teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory*), yang menjelaskan adanya konsentrasi perumbuhan daerah di pusat (*core*), yang tidak selalu membawa dampak positif bagi daerah pinggiran (*hinterland*). Kedua, teori aglomerasi ekonomi, yang menjelaskan

peranan *urbanization economies* dan *localization economies*. 'Penghematan urbanisasi' terjadi karena masyarakat dan investor lebih memilih kawasan perkotaan, yang menawarkan penghematan biaya akibat kemudahan aksesibilitas dan keberadaan infrastruktur kota. 'Penghematan lokalisasi' terjadi karena kedekatan geografis terhadap sumber bahan baku, tenaga kerja, dan *knowledge spillover*. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita
Kabupaten/ Kota di DIY, 1997-2000 vs 2001-2003

Kabupaten/ Kota	1997-2000		2001-2003	
	Pertumbuhan Ekonomi (%)*	PDRB per Kapita (Rp) **	Pertumbuhan Ekonomi (%)*	PDRB per Kapita (Rp)**
Yogyakarta	-2,67	3.310.478	3,37	3.679.107
Sleman	-1,17	1.588.300	4,16	1.700.146
KulonProgo	-8,53	973.190	2,60	999.686
Bantul	-2,01	1.068.987	3,59	1.132.711
GunungKidul	-1,17	1.359.180	2,09	1.439.210
Rata-rata DIY	-3,11	1.660.027	3,16	1.790.172

Keterangan:
* Uji beda rata-rata pertumbuhan ekonomi signifikan pada derajat keyakinan 99%.
** Uji beda rata-rata PDRB/kapita tidak signifikan pada derajat keyakinan 95%
Sumber: KOMPAS, Rubrik Opini, Senin, 13 Desember 2004 oleh Mudrajad Kuncoro (Diolah dari BPS)

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa sebelum otonomi daerah, Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki PDRB perkapita yang lebih tinggi yaitu Rp 3.310.478 dibandingkan ke empat kabupaten lainnya yaitu Sleman sebesar Rp 1.588.300, KulonProgo sebesar Rp 973.190, Bantul sebesar Rp 1.068.987 dan Gunung Kidul sebesar Rp 1.660.027. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita adalah Produk Domestik Regional Bruto yang

dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut (Kuncoro, 2004 : 118), metode ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah/ daerah. Hal ini menjelaskan bahwa Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding 4 kabupaten lainnya, termasuk yang dibahas disini adalah peran pemerintah yang hanya berkonsentrasi pada daerah pusat yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan memicu penduduk dari daerah lain dalam hal ini tenaga kerja beralih ke kota.

Tiga tahun setelah otonomi daerah dilaksanakan sejak januari tahun 2001 lalu, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan daerahnya telah dilakukan secara bertahap, pemerintah daerah yang diberi wewenang penuh untuk mengembangkan daerahnya masing-masing mulai menunjukkan perubahan angka yang signifikan, data PDRB perkapita pada Tabel 1.1 mengindikasikan kemampuan masing-masing daerah yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dibanding sebelum otonomi daerah.

Secara angka memang bisa terlihat bahwa tiap daerah berkembang secara signifikan positif setelah otonomi daerah berjalan, namun bagaimanakah peran dari sektor publik lokal dari masing-masing daerah tersebut dalam membantu pertumbuhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan memperhatikan sektor publik, dimana batasan sektor publik pada tulisan ini hanya meneliti hal yang berhubungan dengan ekonomi kebijakan anggaran (*economics budget policy*) yaitu kebijakan anggaran yang meliputi pengeluaran pemerintah berupa investasi untuk pembangunan regional termasuk pembangunan perkotaan, konstruksi jalan dan lain-

lain serta pengeluaran rutin pemerintah untuk membiayai administrasi umum, kesejahteraan sosial dan pengeluaran lainnya termasuk pertahanan dan pengeluaran untuk pendidikan.

Laju pertumbuhan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah otonomi daerah terus mengalami pertumbuhan, Hal ini dapat diamati selama tahun 2001 hingga 2004 dimana pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2001, laju pertumbuhan sebesar 4,26 persen dan tumbuh menjadi 4,50 persen pada tahun 2002, terus berkembang menjadi 4,58 persen di tahun 2003 dan puncaknya pada tahun 2004 adalah 5,12 persen. Namun pada tahun 2005 pertumbuhan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melambat yaitu sebesar 4,74 persen yang disebabkan oleh naiknya harga BBM.

Pertumbuhan pada masing-masing kota dan kabupaten terus mengalami peningkatan dari awal 2001 hingga tahun 2004. Pengeluaran pemerintah kota dan daerah kabupaten untuk investasi di awal tahun 2001 lebih banyak untuk perbaikan infrastruktur di daerahnya masing-masing dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah kota dan daerah kabupaten memberikan dampak yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya hingga 2004. Dana perimbangan sebagai konsekuensi dilaksanakannya otonomi daerah diterima pemerintah daerah sebagai dana bantuan untuk mengembangkan daerah, masuk sebagai penerimaan pemerintah selain penerimaan dari pajak dan bukan pajak. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah

untuk mendukung pembiayaan di sektor investasi dan belanja pemerintah berupa belanja pegawai berupa penerimaan CPNS baru yang hampir dilakukan serentak setelah otonomi daerah berlangsung. Kegiatan belanja maupun investasi pemerintah terus dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, hasilnya pun secara keseluruhan dapat dilihat secara angka menunjukkan hasil yang signifikan pada tahun 2001 hingga 2004 seperti pada Tabel 1.2.

Pertumbuhan Provinsi Daerah Istimewa ditinjau dari masing-masing daerah kota/ kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Kabupaten
Di Provinsi DIY Tahun 2001-2005 (%)

Tahun	Kabupaten KulonProgo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
2001	3.66	3.74	3.38	4.67	3.94
2002	4.12	4.46	3.26	4.86	4.50
2003	4.19	4.69	3.36	5.08	4.76
2004	4.49	5.04	3.43	5.25	5.05
2005	4.77	4.99	4.33	5.03	4.88

Sumber: BPS, berbagai edisi

Dilihat dari sisi penerimaan pemerintah dari pajak dan bukan pajak, pemasukan terbesar terjadi mulai tahun 2001 lalu, Pemerintah Provinsi DIY yang meliputi Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta telah menerima dana perimbangan sebagai dana untuk

membantu penyelenggaraan otonomi daerah, karena salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya (Suwandi, 2000).

Investasi yang dilakukan pemerintah pasca otonomi daerah memiliki tujuan yang berbeda, selain peran investasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan peluang penyerapan tenaga kerja, pemerintah pada masing-masing daerah juga menginvestasikan dana tersebut ke sektor yang mereka anggap paling vital untuk pertumbuhan daerah dimasa yang akan datang. seperti Kabupaten Kulon Progo misalnya, dana perimbangan yang mereka terima pada tahun 2001 mereka gunakan untuk urusan transportasi sebagai sektor yang menyerap biaya paling besar lalu disusul sektor pertanian dan kesehatan. Kemudian di Kabupaten Bantul, penyerapan dana terbesar setelah adanya dana perimbangan terletak pada sektor kesehatan, pembangunan daerah dan sumber daya air. Begitu juga yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga diharapkan dengan mengutamakan investasi pada sektor publik yang dianggap vital, masyarakat mendapatkan manfaat yang cukup lama (Haryati : 2).

Selain membelanjakan modalnya untuk berinvestasi, pemerintah juga melakukan Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Rutin merupakan konsumsi pemerintah yang mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal dan

belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) (*BPS Prov. DIY*). Sebagian besar konsumsi Pemerintah Provinsi DIY dihabiskan untuk belanja pegawai, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.3. di bawah ini:

Tabel 1.3.
Konsumsi Pemerintah Provinsi DIY menurut Jenis Pembiayaan
Periode 2000 – 2006 (%)

Jenis Pembiayaan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Belanja Pegawai	73,44	70,90	67,15	65,82	68,21	65,75	61,39
2. Belanja Barang	26,56	29,10	32,85	34,18	31,79	34,25	38,61
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi DIY, hasil pengolahan K1, K2 dan Neraca Pemerintah Pusat.

Belanja pegawai pada tahun 2000 – 2003 menunjukkan tanda-tanda penurunan akan tetapi pada tahun 2004 – 2005 mengalami kenaikan karena dilakukannya kembali penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di beberapa instansi pemerintah daerah maupun pusat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membuktikan pengaruh sektor publik lokal selama otonomi daerah yang berlangsung hingga tahun 2006 terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam skripsi yang berjudul “Peranan Sektor Publik Lokal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 – 2006”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah rasio investasi pemerintah daerah kota dan kabupaten terhadap PDRB berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di kota dan kabupaten Provinsi DIY pada tahun 2001 – 2006.
2. Apakah rasio pengeluaran (konsumsi) pemerintah daerah kota dan kabupaten terhadap PDRB berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di kota dan kabupaten Provinsi DIY pada tahun 2001 – 2006.
3. Apakah persentase laju angkatan kerja kota dan kabupaten berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di kota dan kabupaten Provinsi DIY pada tahun 2001 – 2006.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah rasio investasi pemerintah daerah kota dan kabupaten terhadap PDRB berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di masing-masing kota dan kabupaten .
2. Untuk mengetahui apakah rasio pengeluaran pemerintah (konsumsi pemerintah daerah) kota dan kabupaten terhadap PDRB berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di masing-masing kota dan kabupaten.

3. Untuk mengetahui apakah persentase pertumbuhan laju angkatan kerja dari masing-masing kota dan kabupaten berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di masing-masing kota dan kabupaten.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pedoman untuk mengembangkan peranan dari masing-masing sektor publik lokal sehingga daerah menjadi berkembang, khususnya di bidang pelayanan publik.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti baik dalam penelitian maupun obyek penelitian, yang dalam hal ini adalah peranan sektor publik lokal terhadap pertumbuhan regional masing-masing daerah yang meliputi investasi pemerintah, pendapatan pemerintah, belanja pemerintah dan laju angkatan kerja yang erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah.

1.5. Penelitian Sebelumnya

Siti Aisyah Tri Rahayu pada tahun 2003 meneliti tentang Peranan Sektor Publik Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Wilayah Surakarta. Alat analisis yang digunakan adalah regresi dengan panel data. Pengamatan dilakukan secara runtut (time series) dari tahun 1987 – 2000. Sektor-sektor yang diamati yaitu investasi pemerintah daerah, konsumsi pemerintah daerah, penerimaan pemerintah

daerah dan laju angkatan kerja. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, secara garis besar peranan sektor publik lokal ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Investasi Pemerintah Daerah dan Konsumsi Pemerintah Daerah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan regional di Surakarta namun Tenaga Kerja dan Penerimaan Pemerintah berupa Pajak dan Non-Pajak memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan regional di Sukakarta (Rahayu : 133).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Aisyah Tri Rahayu pada tahun 2001 meneliti tentang Peranan Sektor Publik Lokal dan Sektor Swasta Dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional Dan Kesenjangan Yang Terjadi Di Indonesia pada tahun 1987 sampai 1996. Sektor-sektor yang diamati yaitu investasi swasta, investasi pemerintah daerah, laju angkatan kerja, pengeluaran/ konsumsi pemerintah daerah, penerimaan pemerintah dari pajak dan bukan pajak. Alat analisis yang digunakan adalah regresi *Generalize Least Square* (GLS) dengan panel data *cross section* dan *time series*. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah bahwa selama periode pengamatan, ternyata secara garis besar hasil estimasi persamaan menunjukkan bahwa peranan sektor publik lokal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional baik untuk hasil analisis estimasi dengan hasil migas maupun tanpa memasukkan hasil migas (Rahayu : 157).

Penelitian yang dilakukan oleh Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin pada tahun 2005 yang meneliti Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Provinsi Di Indonesia, Pra Dan Pasca Otonomi) tahun 1998 - 2000. Sektor-sektor

yang diamati yaitu penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, laju angkatan kerja, laju inflasi dan ekspor netto. Alat analisis yang digunakan adalah Uji *Hausman Test*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam neger (PMDN) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif. Tetapi dengan membagi periode pengamatan menjadi sebelum dan sesudah otonomi, kelihatan sekali bahwa variabel investai baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode setelah otonomi, sedangkan sebelum otonomi, variabel investasi baik penanaman modal dalam asing (PMA) mapun penanaman modal negeri (PMDN) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini menunjukkan bahwa daerah belum memberikan iklim yang kondusif bagi investor dalam maupun luar negeri (Sodik & Nuryadin : 157).

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah yang diteliti oleh Priyo Hari Adi pada tahun 2006 dengan mengamati variabel pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah pada studi kabupaten dan kota se Jawa-Bali. Dengan menggunakan alat analisis berupa analisis diskriptif dan analisis jalur (*path analysis*). hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa PAD mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi. Namum, pertumbuhan ekonomi pemda kabupaten dan kota masih kecil, akibatnya penerimaan PAD-nya pun kecil. Terkait dengan PAD,

penerimaan yang menjadi adalah adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas. (Adi : 1)

Ida Bagus Putu Purbadharmaja pada tahun 2003 meneliti tentang Implikasi Variabel Pengeluaran Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. Dengan mengamati variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, nilai tukar rupiah terhadap USD, jumlah kredit modal kerja, nilai ekspor neto, nilai hasil produksi pertanian, investasi swasta domestik dan investasi asing dengan menggunakan model pertumbuhan ekonomi Harold-Domar yang dikembangkan oleh Alkadri. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah variabel pengeluaran berpengaruh nyata dan positif terhadap PDRB Propinsi Bali, sedangkan variabel investasi berpengaruh tidak nyata terhadap PDRB Bali, kemudian kontribusi terbesar terhadap PDRB disebabkan oleh variabel nilai tukar rupiah terhadap USD. Hal ini terjadi karena perkembangan pola hidup *dollar minded*. Sebaliknya, variabel pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB (Purbadharmaja : 79).

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 oleh David Hariyanto dan Priyo Hari Adi dalam artikelnya yang berjudul Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita, dengan mengamati variabel-variabel seperti dana alokasi umum, belanja modal dan pendapatan asli daerah. Dengan menggunakan uji asumsi klasik sebagai alat analisis. Hasil analisis yang didapat adalah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja

modal, belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap pendapatan per kapita dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita dan dana alokasi umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui belanja modal (efek tidak langsung) (Harianto & Adi : 1).

1.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diajukan hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

1. Rasio investasi pemerintah daerah terhadap PDRB berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
2. Rasio pengeluaran (konsumsi) pemerintah daerah terhadap PDRB berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
3. Persentase laju pertumbuhan angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

1.7. Definisi Operasional

Berdasarkan uraian di atas maka beberapa variabel yang dibahas dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Istilah “proses” berarti mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus:

$$PE = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100 \%$$

Dimana:

Y = PDRB

t = tahun tertentu

t-1 = tahun sebelumnya

PE = pertumbuhan ekonomi

2. Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja (L) diambil dari definisi yang dipakai oleh BPS, yaitu mencakup orang yang berkerja dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, punya pekerjaan tetapi sedang tidak berkerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Data laju pertumbuhan angkatan kerja (L) didapatkan dari jumlah total angkatan kerja di tiap-tiap kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data L diperoleh dari angkatan kerja yang diterbitkan oleh BPS. L diukur dengan:

$$L = \frac{(L_t - L_{t-1})}{L_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

L = laju pertumbuhan angkatan kerja (dalam persentase)

t = tahun tertentu

$t-1$ = tahun sebelumnya

L = jumlah angkatan kerja (dalam satuan jiwa)

3. Investasi Pemerintah Daerah (RIY) ini adalah rasio dari jumlah besarnya pengeluaran pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tiap-tiap kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap PDRB. Pengeluaran pembangunan ini mencakup pengeluaran untuk industri, pengeluaran untuk pembangunan daerah dan perekonomian. Pengeluaran untuk industri dan ekonomi juga termasuk didalamnya begitu juga dengan pertanian dan perikanan, kehutanan dan pengeluaran ekonomi regional. Pengeluaran pembangunan regional meliputi pembangunan perkotaan, konstruksi jalan dan bermacam-macam pengeluaran pembangunan regional lainnya.
4. Konsumsi Pemerintah Daerah (RGY) ini adalah rasio dari jumlah pengeluaran untuk membiayai administrasi umum, kesejahteraan sosial dan pengeluaran lainnya termasuk pertahanan dan pengeluaran untuk pendidikan terhadap PDRB. Data konsumsi pemerintah daerah ini diambil dari pengeluaran rutin pemerintah daerah dalam APBN yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Yogyakarta.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Daerah Penelitian

Penelitian mengenai peran sektor publik lokal dalam pertumbuhan ekonomi regional di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengambil tempat di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten KulonProgo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul.

1.8.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data yang merupakan gabungan antara observasi lintas sektoral dan runtun waktu yang diperoleh dari sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta berbagai edisi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi investasi pemerintah daerah, konsumsi pemerintah daerah, laju angkatan kerja dan pendapatan domestik regional bruto.

1.8.3 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan laju pertumbuhan ekonomi regional sebagai variabel dependen (PE) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai variabel independen investasi pemerintah daerah (RIY), laju angkatan kerja (L) dan pengeluaran/ konsumsi pemerintah daerah (RGY) dengan menggunakan analisis dengan metode OLS (*common*), *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan tehnik mana yang paling tepat dalam mengestimasi data panel maka perlu dilakukan uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

1.8.4 Model

Langkah pertama yang penting dalam penelitian ekonometrika adalah membuat spesifikasi model. Model yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang terukur di dalam model tersebut, sehingga dapat mempermudah dalam menganalisis data.

Model yang digunakan (Siti Aisyah Tri Rahayu, 2003)

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 RIY_{it} + \beta_2 L_{it} + \beta_3 RGY_{it} + \mu_{it}$$

PE = Pertumbuhan ekonomi regional (dalam persentase).

RIY = Rasio investasi pemerintah daerah dengan PDRB (dalam rasio).

L = Laju angkatan kerja (dalam persentase).

RGY = Rasio Pengeluaran/ konsumsi pemerintah daerah dengan PDRB (dalam rasio).

μ_i = Variabel gangguan (*disturbance error terms*)

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

i = Kabupaten/ Kota

t = Tahun tertentu

1.8.5 Regresi Data Panel

Batalgi (2001) menyusun keuntungan data panel dibandingkan dengan data *time series* atau *cross-section*, yaitu:

1. Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap unit.

2. Dengan data panel, data lebih informatif, mengurangi kolinieritas antara variabel, meningkatkan derajat kebebasan dan lebih efisien.
3. Data panel cocok digunakan untuk menggambarkan adanya dinamika perubahan.
4. Data panel dapat lebih mampu mendeteksi dan mengukur dampak.
5. Data panel bisa digunakan untuk studi dengan model yang lebih lengkap.
6. Data panel dapat meminimumkan bias yang mungkin dihasilkan dalam regresi.

Model regresi dengan data panel, secara umum mengakibatkan kita mempunyai kesulitan dalam spesifikasi modelnya. Residualnya akan mempunyai tiga kemungkinan yaitu residual *time series*, *cross section* maupun gabungan keduanya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, diantaranya adalah metode *Fixed Effect* dan metode *Random Effect*.

1.8.6 Metode *Fixed Effect*

Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model ini sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan residualnya. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul yaitu:

1. Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh residual.
2. Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu.

3. Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu.
4. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu
5. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.

1.8.6.1 Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan metode OLS dikenal dengan estimasi *Common Effect*. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar variabel sama dalam berbagai kurun waktu.

1.8.7 Metode Random Effects

Di dalam mengestimasi data panel dengan *fixed effect* melalui teknik variabel *dummy* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, bisa menggunakan variabel residual yang dikenal dengan model *random effect*. Di dalam model ini akan dipilih estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

Didalam menjelaskan *random effect* diasumsikan setiap variabel mempunyai perbedaan intersep. Namun demikian, mengasumsikan bahwa intersep adalah variabel *random* atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individual variabel yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil dari populasi. Untuk menjelaskan model *random effect* dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{LnPE}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnRIY}_{it} + \beta_2 \text{LnL}_{it} + \beta_3 \text{LnRGY}_{it} + e_{it}$$

dalam hal ini β_{0i} tidak lagi tetap (nonstokastik) tetapi bersifat random sehingga dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\beta_{0i} = \bar{\beta}_0 + \mu_i = \text{dimana } i = 1, \dots, n$$

$\bar{\beta}_0$ adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep populasi dan μ adalah residual yang bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku variabel secara individu.

$$PE_{it} = \bar{\beta}_0 + \beta_1 \text{LnRIY}_{it} + \beta_2 \text{LnL}_{it} + \beta_3 \text{LnRGY}_{it} + v_{it}$$

dimana $v_{it} = e_{it} + \mu_i$

Persamaan di atas merupakan persamaan untuk metode *random effect*. Nama metode *random effect* berasal dari pengertian bahwa residual v_{it} terdiri dari dua komponen yaitu residual secara menyeluruh e_{it} yaitu kombinasi *time series* dan *cross section* dan residual secara individu μ_i . dalam hal ini residual μ_i adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu. Karena adanya korelasi antara residual di dalam persamaan di atas maka teknik metode OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien. Metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effect* adalah *Generalized Least Square* (GLS) dengan menggunakan alat bantu program E-views.

1.8.8 Uji Hausman

Perhitungan uji Hausman untuk pemilihan model *Fixed Effect* atau *Radom Effect* tidak secara langsung bisa didapatkan di dalam window E-views, tetapi melalui

Command E-views. *Command E-views* dilakukan dengan cara menyiapkan datanya dan kemudian menulis perintahnya di bawah menu utama windows.

Adapun perintahnya sebagai berikut (Agus Widarjono, 2005):

1. Estimasi dengan metode *Fixed Effect* dengan perintah sebagai berikut (setiap perintah diakhiri dengan tekan *enter*):

```
Poolperan.is(F) log(RIY?) log(L?) log(RGY?)
```

```
Vector beta=Poolperan.@coefs
```

```
Matrix covar=Poolperan.@cov
```

```
Vector b_fixed=@subextract(beta,1,1,3,1)
```

```
Matrix cov_fixed=@subextract(covar,1,1,3,3)
```

Ket : angka 3 = jumlah variabel independen

2. Estimasi dengan metode *Random Effect* dengan perintah sebagai berikut:

```
Poolperan.is(R) log(RIY?) log(L?) log(RGY?)
```

```
Vector beta=Poolperan.@coefs
```

```
Matrix covar=Poolperan.@cov
```

```
Vector b_gls=@subextract(beta,2,1,4,1)
```

```
Matrix cov_fixed=@subextract(covar,1,1,4,4)
```

Ket : angka 4 = jumlah variabel independen ditambah konstanta

3. Perhitungan Hausman dengan perintah sebagai berikut

```
Matrix b_diff=b_fixed - b_gls
```

```
Matrix v_diff=cov_fixed - cov_gls
```

```
Matrix H=@transpose(b_diff)*@inverse(v_diff)*b_diff
```

Hasil uji statistik hausman setelah mengikuti langkah 1 sampai 3 bisa dilihat dengan double klik pada h.

1.8.9 Uji Statistik

Pengujian statistik ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi non linier merupakan model yang tepat untuk menggambarkan hubungan antar variabel dan apakah ada hubungan yang signifikan diantara variabel-variabel dependen dengan variabel-variabel penjelas (seperti : uji statistik t dan uji statistik F) selain itu kita bisa melihat nilai hasil estimasi untuk R^2 (koefisien determinasi).

1.8.9.1 Uji statistik t

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel *independent* berpengaruh signifikan secara individu terhadap variabel *dependent*. Metode yang digunakan dalam t-test adalah dengan cara membandingkan nilai t_{hit} dari masing-masing koefisien variabel bebas terhadap nilai t_{tabel} pada derajat keyakinan 1%, 5%, atau 10%. Jika $t_{hit} > t_{tabel}$ berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Semakin kecil derajat keyakinan yang digunakan, maka kemungkinan penolakan H_0 semakin kecil, sehingga dapat disimpulkan variabel *independen* tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

1.8.9.2 Uji Statistik F

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel *independent* yang digunakan dalam model secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam pengujian ini, hipotesis yang dikemukakan adalah :

- Hipotesis nol (H_0) : $b_1 = b_2 = b_3 = 0$
- Hipotesis alternatif (H_a) : $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai $F_{\text{statistik}}$ terhadap nilai F_{tabel} . Jika $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima. Jika hipotesis nol diterima, maka dapat diartikan bahwa semua parameter estimasi sama dengan nol. Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel-variabel *independent* dengan variabel *dependent*.

1.8.9.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi R^2 digunakan untuk menyatakan tingkat keeratan hubungan antara variabel-variabel independent dan variabel-variabel dependent. Nilai R^2 terletak diantara 0 dan 1. semakin besar nilai R^2 (mendekati 1), dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan adalah baik. Nilai R^2 digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel *independent* yang digunakan dalam persamaan, dapat menjelaskan variabel *dependent*.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam skripsi ini penulis bagi menjadi lima (5) bab, yaitu:

Bab I	:	Pendahuluan Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II	:	Tinjauan Pustaka Meliputi teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,

		terutama mengenai otonomi daerah, sektor publik, pengeluaran pemerintah, investasi dan laju angkatan kerja.
Bab III	:	Gambaran umum daerah yang diteliti yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi letak geografis, keadaan penduduk dan kondisi perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta perkembangan PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bab IV	:	Analisis Data dan Pembahasan Bab ini memuat tentang pembahasan analisis data dan hasil perhitungan dari data yang telah diolah berdasarkan hipotesis penelitian yang ditentukan, meliputi pengujian ekonometrika dan statistik
Bab V	:	Kesimpulan dan Saran Bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil perhitungan analisis, dan saran-saran yang dianggap perlu dan relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.